



PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

KECAMATAN GAMBUT
KABUPATEN BANJAR



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 251 /KUM/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
- c. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
- d. Bab IV Penutup.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 triwulan I dan penjelasan terkait terealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, factor-faktor yang mempengaruhi beserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Gambut dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Gambut, 19 Juni 2025
Camat Gambut



AHMAD FAUZAN, S.STP., M.Si.
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19801125 200012 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 <i>Latar Belakang</i>	1
1.2 <i>Landasan Hukum</i>	2
1.3 <i>Maksud dan Tujuan</i>	5
1.3.1 <i>Maksud</i>	5
1.3.2 <i>Tujuan</i>	5
1.4 <i>Sistematika Penulisan</i>	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	8
2.1 <i>Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan</i>	8
<i>Capaian Renstra Perangkat Daerah</i>	8
2.1.1 <i>Realisasi program / kegiatan / sub kegiatan yang TIDAK MEMENUHI</i>	18
<i>TARGET kinerja hasil /keluaran yang direncanakan sampai triwulan I</i>	18
2.1.2 <i>Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang TELAH MEMENUHI TARGET kinerja</i> <i>hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I</i>	18
2.1.3 <i>Realisasi program/kegiatan yang MELEBIHI TARGET KINERJA hasil/keluaran yang</i> <i>direncanakan sampai triwulan I</i>	20
2.1.4 <i>Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja</i>	20
<i>program/kegiatan</i>	20
2.1.5 <i>Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja</i>	21
<i>program/ kegiatan</i>	21
2.1.6 <i>Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah</i>	21
2.1.7 <i>Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk</i> <i>mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut</i>	21
BAB III	32
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1 <i>Perubahan Indikator Kinerja</i>	32
3.2 <i>Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan</i>	32
3.4 <i>Alasan dilakukan perubahan</i>	33
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 hingga triwulan I dan Capaian Renstra SKPD	10
Tabel 2 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2025 s/d Triwulan I	23
Tabel 3 1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Gambut Tahun 2025 ini :

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan/penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/285/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) tanggal 20 Agustus 2025;
 18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
 19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Gambut tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gambut agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokokmateri yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagai unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan sebesar Rp. 6.636.890.934,- (*Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) dengan rincian pada **Kecamatan Gambut** sebesar Rp. 5.168.250.292,- (*Lima Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), **Kelurahan Gambut** sebesar Rp. 756.814.121,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah*) dan **Kelurahan Gambut Barat** sebesar Rp. 711.826.421,- (*Tujuh Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Pulu Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) dengan capaian realisasi sebesar Rp. 6.030.474.405,- (*Enam Milyar Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*) atau sebesar 90,86%.

Tahun anggaran 2025 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar melaksanakan 6 program, 16 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.113.938.340,- (*Tujuh Milyar Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan rincian anggaran **Kecamatan Gambut** sebesar

Rp 5.505.172.000,- (*Lima Milyar Lima Ratus Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*), **Kelurahan Gambut** sebesar Rp 896.551.920,- (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) dan **Kelurahan Gambut Barat** sebesar Rp 712.214.420,- (*Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pada saat perubahan Kecamatan Gambut melaksanakan 6 program, 16 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 7.283.080.340,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan rincian anggaran **Kecamatan Gambut** sebesar Rp. 5.814.616.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*), **Kelurahan Gambut** sebesar Rp 738.900.920,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*), dan **Kelurahan Gambut Barat** sebesar Rp 729.563.420,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sampai triwulan I tahun 2025 secara lengkap, tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 hingga triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	12=(5+7+10)	13=(12/4)				
7		Urusan : Unsur Kewilayahan														
7	01	Bidang Urusan: Kecamatan														
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	82	74.00	76	88.07	115.88	-	-	NA	162.07	197.65	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	NA	16	16	100.00	1	1	100	17	43
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	NA	1	1	100.00	NA	NA	NA	1	20
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100.00	NA	NA	NA	2	40
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9	NA	3	3	100.00	NA	NA	NA	3	33
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19	20	5	5	100.00	1	1	100	26	137
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31	NA	3	3	100.00	3	3	100	6	19
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	159	35	40	40	100.00	-	-	-	75	47
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52	12	12	12	100.00	3	3	100	27	52
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	NA	1	1	100.00	-	-	-	1	25
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	41	12	12	12	100.00	3	3	100	27	66
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	12	1	1	100.00	2	2	100	15	188
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14	6	5	5	100.00	-	-	NA	11	79

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	NA	2	2	100.00	1	1	100	3	50
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	4	5	5	100.00	1	1	100	10	50
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47	20	20	20	100.00	NA	NA	NA	40	85
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18	12	10	10	100.00	-	-	NA	22	122
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16	12	1	1	100.00	3	3	100	16	100
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100.00	3	3	100	27	45
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15	NA	12	12	100.00	-	-	NA	12	80
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	NA	NA	NA	NA	1	0	0	0	0
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	3	2	2	100.00	5	2	40	10	53
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39	12	12	12	100.00	3	3	100	27	69
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40	12	12	12	100.00	3	3	100	27	68
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50	12	12	12	100.00	3	3	100	27	54

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17	8	5	5	100.00	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71	10	10	10	100.00	5	1	20	25	35
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	3	3	3	100.00	-	-	-	0	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Kecamatan	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	26	4	6	6	100.00	2	2	100	12	46

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7 01 03 2.01	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	4	3	3	100.00	3	3	100	10	77
7 01 03 2.01	0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23	12	12	12	100.00	-	-	NA	24	104
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
Kelurahan Gambut												
7 01 03 2.02	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0
7 01 03 2.02	0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gambut dan Kelurahan Gambut Barat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0.00
7 01 03 2.02	0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22	1	1	1	100.00	-	-	-	0	0.00
7 01 03 2.02	0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0.00
Kelurahan Gambut Barat												
7 01 03 2.02	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0
7 01 03 2.02	0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gambut Barat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Gambut dan Kelurahan Gambut Barat)											
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31	2	2	2	100.00	-	-	-	0	0.00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0.00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	NA	NA	NA	NA	25	25	100	25	25
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100.00	25	25	100	225	225
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31	NA	2	2	100.00	3	3	100	5	16
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	1	1	1	100.00	1	1	100	3	50
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	NA	100	100	100.00	25	25	100	125	125
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	6	NA	1	1	100.00	-	-	NA	1	17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100.00	25	25	100	225	225		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	100	100.00	25	25	100	225	225		
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1301	350	300	300	100.00	-	-	NA	650	50
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	1	1	1	100.00	NA	NA	NA	2	67
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	12	1	1	100.00	NA	NA	NA	13	650
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100.00	25	25	100	225	225		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100.00	25	25	100	225	225		
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17	1	1	1	100.00	1	1	100	3	18
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	7	1	1	1	100.00	-	-	-	2	29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja SKPD Tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun (n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
		Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	1	1	1	100.00	-	-	-	2	40
7	01	06	2.01	0006	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	NA	NA	NA	NA	-	-	-	0	0
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7	1	1	1	100.00	-	-	-	2	29
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7	1	1	1	100.00	-	-	-	2	29
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	19	1	1	1	100.00	-	-	-	2	11

Sumber data : - Rencana Strategis Perubahan Kedua Kecamatan Gambut Tahun 2021-2026

- LkjIP Kecamatan Gambut Tahun 2024
- Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Gambut Tahun 2025

2.1.1 Realisasi program / kegiatan / sub kegiatan yang TIDAK MEMENUHI TARGET kinerja hasil /keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.1.2 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang TELAH MEMENUHI TARGET kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

- Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang MELEBIHI TARGET KINERJA hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Sampai pada triwulan I, tidak terdapat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya melebihi target yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan masih berada dalam batas capai target yang telah ditetapkan.

2.1.4 Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025:

- Pada sub Pengadaan Mebel terkendala dikarenakan spesifikasi mebel yang ada di toko / rekanan tidak sesuai standar harga sehingga masih dalam tahap koordinasi dengan barang.
- Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terkendala dikarenakan spesifikasi mebel yang ada di toko /

rekanan tidak sesuai standar harga sehingga masih dalam tahap koordinasi dengan barang.

- Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terkendala dikarenakan belum jadwal pelaksanaan pemeliharaan barang.

2.1.5 Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025:

- Sebagian besar kegiatan baru memasuki tahap awal pelaksanaan, seperti proses administrasi, persiapan teknis, atau penandatanganan kontrak sehingga output belum sepenuhnya terealisasi..
- Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan yang tepat, sehingga tercapainya indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.
- Beberapa indikator kinerja baru dapat tercapai pada triwulan II/III/IV sesuai dengan Rencana Aksi kegiatan masing-masing.

2.1.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukan, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Gambut.

2.1.7 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Lebih meningkatkan koordinasi baik di internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Gambut Tahun 2025 s/d Triwulan I

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
			VOLUME	SATUAN		TRIWULAN I		TRIWULAN I	
					DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					7,113,938,340		1,897,424,751		1,439,290,252
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	79	Nilai	5,098,585,000	-	1,544,287,742	-	1,389,112,052
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD yang tersusun	100	Persen	13,245,000	25	3,383,000	25	1,350,000
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	5,380,000	1	1,480,000	1	500,000
	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	3,785,000	2	863,000	2	500,000
	c Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	4,080,000	3	1,040,000	3	350,000
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	3,853,220,000	25	981,427,742	25	929,987,423
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang	3,770,300,000	0	961,162,742	0	910,677,823
	b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	81,920,000	3	19,840,000	3	18,974,600

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
			VOLUME	SATUAN		TRIWULAN I		TRIWULAN I	
					DPA	TK	Rp	RK	Rp
	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1,000,000	0	425,000	0	335,000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan BMD tepat waktu	100	Persen	23,000,000	25	5,650,000	25	5,439,600
	a Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Dokumen	23,000,000	3	5,650,000	3	5,439,600
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	19,080,000	25	1,115,000	25	1,099,000
	a Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9	Dokumen	4,080,000	3	1,115,000	3	1,099,000
	b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	15,000,000	0	-	0	-
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	100	Persen	204,417,000	25	72,789,000	25	49,079,200
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2,455,000	0	710,000	0	628,000
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	34,141,000	0	21,136,000	0	15,766,500
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	7,521,000	0	6,031,000	0	1,850,000

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		
			VOLUME	SATUAN		TRIWULAN I		TRIWULAN I		
					DPA	TK	Rp	RK	Rp	
	e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	9,700,000	0	2,425,000	0	790,000
	f	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	5,000,000	3	1,310,000	3	490,000
	g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	132,200,000	3	37,340,000	3	29,554,700
	h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	13,400,000	0	3,837,000	0	-
	1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	394,226,000	75	365,539,000	50	327,083,325
	a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	6,000,000	1	6,000,000	0	-
	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	388,226,000	5	359,539,000	2	327,083,325
	1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	100	Persen	214,457,000	25	61,422,000	25	52,309,004
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	56,262,000	0	14,112,000	0	5,456,140
	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	153,195,000	3	46,310,000	1	45,852,864
	1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	100	Persen	376,940,000	25	52,962,000	25	22,764,500

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		
			VOLUME	SATUAN		TRIWULAN I		TRIWULAN I		
					DPA	TK	Rp	RK	Rp	
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	68,440,000	0	18,996,000	0	9,043,000
	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	13,240,000	5	4,670,000	3	2,600,000
	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	295,260,000	0	29,296,000	0	11,121,500
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	100	Persen	171,026,000	25	39,770,500	25	30,565,000	
	2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	171,026,000	25	39,770,500	25	30,565,000	
	a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	Laporan	171,026,000	2	39,770,500	1	30,565,000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	1,694,398,340	25	303,389,509	25	10,710,200	

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
			VOLUME	SATUAN		TRIWULAN I		TRIWULAN I	
					DPA	TK	Rp	RK	Rp
	3.1 Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	Persen	20,886,000	25	11,352,000	25	10,710,200
	a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga Kemasyarakatan	11,352,000	3	11,352,000	3	10,560,200
	b Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	9,534,000	0	-	0	150,000
	3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100	Persen	1,608,766,340	25	286,793,009	25	96,216,971
	(Kelurahan Gambut)				896,551,920		148,651,250		49,297,585
	a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	10,152,000	0	-	0	-
	b Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	199,999,920	0	-	0	-
	c Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas	611,400,000	0	141,411,250	0	49,297,585
	d Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Laporan	75,000,000	0	7,240,000	0	-

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
			VOLUME	SATUAN		TRIWULAN I		TRIWULAN I	
					DPA	TK	Rp	RK	Rp
	(Kelurahan Gambut Barat)				712,214,420		138,141,759		46,919,386
	e Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	5,645,000	0	-	0	-
	f Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	Unit	199,999,920	0	-	0	-
	g Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas	497,589,500	0	134,721,759	0	46,919,386
	h Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Laporan	8,980,000	-	3,420,000	-	-
	3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	64,746,000	25	5,244,500	25	5,244,500
	a Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50	Keluarga	64,746,000	0	5,244,500	0	5,244,500
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	29,880,000	25	5,940,000	25	5,930,000

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
			VOLUME	SATUAN		TRIWULAN I		TRIWULAN I	
					DPA	TK	Rp	RK	Rp
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	26,820,000	25	5,940,000	25	5,930,000
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terfasilitasi	12	Laporan	23,760,000	3	5,940,000	3	5,930,000
b	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	3,060,000	0	-	0	-
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Persen	3,060,000	0	-	0	-
a	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	3,060,000	0	-	0	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	91,900,000	0	-	0	0

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN	
			VOLUME	SATUAN		DPA	TRIWULAN I		TRIWULAN I
					TK		Rp	RK	Rp
	5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	91,900,000	0	-	0	0
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	Orang	91,900,000	0	-	0	0
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	28,149,000	25	4,037,000	25	2,973,000
	6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	28,149,000	25	4,037,000	25	2,973,000
	a Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	4,037,000	1	4,037,000	1	2,973,000

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		REALISASI KINERJA & TARGET ANGGARAN TRIWULAN		
			VOLUME	SATUAN		TRIWULAN I		TRIWULAN I		
					DPA	TK	Rp	RK	Rp	
	b	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	4,037,000	0	-	0	-
	c	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	8,074,000	0	-	0	-
	d	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	4,037,000	0	-	0	-
	e	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	4,037,000	0	-	0	-
	f	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	3,927,000	0	-	0	-

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Gambut Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan pada level tujuan, sasaran, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan karena adanya Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029 serta penyesuaian terhadap target kinerja. Selain perubahan tujuan, sasaran, dan indikator, juga terdapat perubahan target indikator dan pagu anggaran Kecamatan Gambut Tahun 2025. Adapun perubahan dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1.

3.2 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 16 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah.

3.3 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 7.283.080.340,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan rincian anggaran **Kecamatan Gambut** sebesar Rp. 5.814.616.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*), **Kelurahan Gambut** sebesar Rp 738.900.920,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*), dan **Kelurahan Gambut Barat** sebesar Rp 729.563.420,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4 Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu

3.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota,

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN perubahan anggaran dilakukan karena :
 - Kurangnya anggaran Gaji Pokok PPPK;
 - Kurangnya anggaran Tunjangan Keluarga, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK;
 - Kurangnya anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan PPPK; dan
 - Kurangnya anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja.

1.2 Kegiatan Adiministrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor penambahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan belanja kursi lipat/susun untuk menunjang kegiatan rapat di Kantor Kecamatan.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adanya penambahan anggaran karena adanya penambahan anggaran untuk Expo Banjar, perjalanan dinas biasa dan dalam kota.

1.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Pengurangan anggaran dilakukan karena adanya penyesuaian harga realisasi belanja
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penambahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan beberapa item belanja seperti :
 - Kursi di ruang pelayanan demi menunjang kegiatan

pelayanan di Kecamatan;

- Lemari es di ruang pelayanan demi menunjang kegiatan pelayanan di Kecamatan;
- A.C Split di ruang pelayanan guna meningkatkan kenyamanan pengunjung dalam menerima layanan di Kecamatan; dan
- Kursi Kerja untuk menunjang kenyamanan pegawai dalam bekerja.

1.4 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penambahan anggaran dilakukan karena Adanya penambahan ruang baru sehingga diperlukan penambahan daya listrik.

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Perubahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan anggaran BBM untuk mobil Camat serta penambahan anggaran untuk pemeliharaan Mobil Operasional Kecamatan.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Penambahan Anggaran dilakukan untuk pembuatan Neon Box (I Love Gambut) sebagai ikon Kecamatan Gambut

3.1.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kepada Camat

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan
Adanya pengurangan anggaran untuk jumlah kafilah yang mengikuti MTQ Kabupaten.

3.1.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.1 Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Adanya penambahan anggaran belanja untuk Evaluasi dan Monitoring APBDes

1.2 Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan

- Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adanya penambahan anggaran untuk belanja Sepeda Motor di kelurahan Gambut dan Kelurahan Gambut Barat
- Sub kegiatan Evaluasi Kelurahan adanya perubahan rincian belanja di Kelurahan Gambut.

3.1.4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Adanya penambahan anggaran untuk belanja jasa penyelenggara acara seperti : Komandan upacara, paduan suara, pelatih paduan suara, dan petugas dokumentasi.

3.1.5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adanya pengurangan karena kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa dilaksanakan pada Tahun 2026.

Tabel 3 1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
					Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Pelayanan Publik						- Perubahan Tujuan
2	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	-	Nilai SAKIP (Predikat SAKIP)	A	A	5,098,585,000	5,231,353,000	132,768,000	- Perubahan Sasaran/target/ indikator Kinerja - Penambahan Pagu Anggaran
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut	79 Nilai	88.07 Nilai	5,098,585,000	5,231,353,000	132,768,000	- Perubahan Target Kinerja - Penambahan Pagu Anggaran
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100%	100%	13,245,000	13,245,000	-	- Perubahan Indikator Kinerja
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	5,380,000	5,380,000	-	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3,785,000	3,785,000	-	-
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	4,080,000	4,080,000	-	-
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	3,853,220,000	3,849,180,000	(4,040,000)	- Perubahan Indikator Kinerja - Pengurangan Anggaran
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	35 Orang	3,770,300,000	3,770,300,000	-	-
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	81,920,000	77,880,000	(4,040,000)	- Pengurangan Anggaran terhadap Honor PPKomitmen Sehubungan PA yang juga menjabat mejadi PPKomitmen
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	-	-
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100%	100%	23,000,000	23,000,000	-	- Perubahan Indikator Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
					Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	23,000,000	23,000,000	-	
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100%	100%	19,080,000	16,080,000	(3,000,000)	- Perubahan Indikator Kinerja - Pengurangan Anggaran
15	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9 Dokumen	9 Dokumen	4,080,000	4,080,000	-	-
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	15,000,000	12,000,000	(3,000,000)	'Surat Edaran Nomor : 900.1.1.4/02-03/BPKPAD tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD TA.2025
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%	204,417,000	206,641,000	2,224,000	- Perubahan Indikator Kinerja - Penambahan Anggaran
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,455,000	2,455,000	-	-
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	34,141,000	34,365,000	224,000	- Pergeseran dan Penambahan Anggaran di dalam sub kegiatan untuk Pengadaan Kursi Rapat
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7,521,000	7,521,000	-	-
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9,700,000	9,700,000	-	-
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	-	-
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	132,200,000	134,200,000	2,000,000	Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang (Penambahan Pagu Anggaran Perjalanan Dinas)
24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	13,400,000	13,400,000	-	-
25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100%	100%	394,226,000	394,090,000	(136,000)	- Perubahan Indikator Kinerja - Pengurangan Anggaran
26	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	6,000,000	5,864,000	(136,000)	- Penyesuaian belanja

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
					Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	17 Unit	388,226,000	388,226,000	-	-
28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	214,457,000	254,457,000	40,000,000	- Perubahan Indikator Kinerja - Penambahan Anggaran
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	-	-
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	56,262,000	96,262,000	40,000,000	Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang (Penambahan Pagu Anggaran untuk Daya Listrik karena Penambahan bangunan Aula Kecamatan)
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	153,195,000	153,195,000	-	-
32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	376,940,000	474,660,000	97,720,000	- Perubahan Indikator Kinerja - Penambahan Anggaran
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	9 Unit	68,440,000	116,160,000	47,720,000	Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang (Penambahan pagu anggaran untuk Mobil Operasional Kecamatan)
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	13,240,000	13,240,000	-	-
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	295,260,000	345,260,000	50,000,000	Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang (Penambahan Anggaran untuk Sign Neon Box Kecamatan Gambut)
36	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks	94.15 Nilai	2,015,353,340	2,051,727,340	36,374,000	- Perubahan Sasaran/target/ indikator Kinerja - Penambahan Pagu Anggaran
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	82 Indeks	96.70 Nilai	-	-	-	- Perubahan kalimat sasaran
37	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang terlaksana	100%	100%	171,026,000	161,026,000	(10,000,000)	- Perubahan Indikator Kinerja - Pengurangan Anggaran
38	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	171,026,000	161,026,000	(10,000,000)	- Perubahan Indikator Kinerja - Pengurangan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
					Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
				Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%				
				Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses	100%	100%				
				Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100%	100%				
39	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	6 Laporan	171,026,000	161,026,000	(10,000,000)	- Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang - pengurangan anggaran untuk jumlah kafilah yang mengikuti MTQ
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	100%	85,632,000	97,632,000	12,000,000	- Perubahan Indikator Kinerja - Penambahan Anggaran
41	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	100%	100%	20,886,000	32,886,000	12,000,000	- Perubahan Indikator Kinerja - Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%					
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses	100%	100%					
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100%	100%					
42	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Masyarakat	6 Lembaga Masyarakat	11,352,000	11,352,000	-	-
43	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	9,534,000	21,534,000	12,000,000	- Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang tentang Tambahan Pendanaan pada Pagu Indikatif SKPD RKPDP Perubahan 2025 - Telaahan Staf Ketua Forum Camat
44	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	64,746,000	64,746,000		
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%					
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses	100%	100%					
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100%	100%					

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
					Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
45	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	50 Keluarga	64,746,000	64,746,000	-	-
46	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100%	100%	29,880,000	29,880,000	-	Perubahan Indikator Kinerja
47	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	26,820,000	26,820,000	-	Perubahan Indikator Kinerja
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100%	100%					
Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses				100%	100%					
Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan				100%	100%					
48	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	23,760,000	23,760,000	-	-
49	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	3,060,000	3,060,000	-	-
50	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	3,060,000	3,060,000	-	Perubahan Indikator Kinerja
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100%	100%					
Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses				100%	100%					
Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan				100%	100%					
51	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Laporan dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Laporan dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	3,060,000	3,060,000	-	-
52	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100%	100%	91,900,000	99,650,000	7,750,000	- Perubahan Indikator Kinerja - Penambahan anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
					Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
53	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	91,900,000	99,650,000	7,750,000	- Perubahan Indikator Kinerja - Penambahan anggaran
				Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%				
				Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses	100%	100%				
				Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100%	100%				
54	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	300 Orang	300 Orang	91,900,000	99,650,000	7,750,000	- Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang tentang Tambahan Pendanaan pada Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan 2025 (Penambahan Makanan dan Minuman Jamuan Untuk Paduan Suara dan Penambahan Anggaran Honor Latihan Paduan Suara)
55	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100%	100%	28,149,000	20,075,000	(8,074,000)	- Perubahan Indikator Kinerja - Pengurangan Anggaran
56	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	28,149,000	20,075,000	(8,074,000)	- Perubahan Indikator Kinerja - Pengurangan Anggaran
				Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%				
				Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses	100%	100%				
				Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100%	100%				
57	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4,037,000	4,037,000	-	
58	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4,037,000	4,037,000	-	
59	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	-	8,074,000	-	(8,074,000)	Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada Tahun 2026

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
					Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
60	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4,037,000	4,037,000	-	-
61	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4,037,000	4,037,000	-	-
62	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3,927,000	3,927,000	-	-
KELURAHAN GAMBUT										
63	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	100%	896,551,920	913,900,920	17,349,000	- Perubahan Indikator Kinerja - Penambahan anggaran
64	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	100%	100%	896,551,920	913,900,920	17,349,000	- Perubahan Indikator Kinerja - Penambahan anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%					
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses	100%	100%					
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100%	100%					
65	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10,152,000	10,152,000	-	-
66	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	199,999,920	200,000,000	80	- Penyesuaian anggaran belanja
67	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	611,400,000	619,773,920	8,373,920	- Surat Edaran Nomor : 900.1.1.4/02-03/BPKPAD tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD TA.2025 - Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang tentang Tambahan Pendanaan pada Pagu Indikatif SKPD RKPD Perubahan 2025 (Penambahan Kendaraan Bermotor Roda 2)

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
					Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
68	Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	83,975,000	8,975,000	- Penambahan Anggaran untuk pemenuhan peralatan di Kelurahan
KELURAHAN GAMBUT BARAT										
69	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	100%	100%	712,214,420	729,563,420	17,349,000	- Perubahan Indikator Kinerja - Penambahan anggaran
70	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	712,214,420	729,563,420	17,349,000	- Perubahan Indikator Kinerja - Penambahan anggaran
				Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%				
				Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses	100%	100%				
				Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	100%	100%				
71	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5,645,000	5,645,000	-	-
72	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Unit	2 Unit	199,999,920	200,000,000	80	- Penyesuaian anggaran belanja
73	Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	497,589,500	514,938,420	17,348,920	- Surat Edaran Nomor : 900.1.1.4/02-03/BPKPAD tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD TA.2025 - Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.4/471/PPE-Bappedalitbang tentang Tambahan Pendanaan pada Pagu Indikatif SKPD RKKPD Perubahan 2025 (Penambahan Kendaraan Bermotor Roda 2)
74	Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	8,980,000	8,980,000	-	

Sumber Data : Inputan Perubahan Renja Kecamatan Gambut di SIPD Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagipemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN KEADILAN”**.

Perubahan Renja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
- b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gambut Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi,

misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaiantujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Gambut secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;
2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambut, 19 Juni 2025

Camat Gambut



AHMAD FAUZAN, S.STP., M.Si.

Pembina TK I/ IV.b

NIP. 19801125 200012 1 003

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN GAMBUT

Alamat : Jl. Jend. A. Yani KM. 14.800 Gambut 70652
Website : <https://kec-gambut.banjarkab.go.id> Email : kec.gambut@banjarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT
KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 19.a TAHUN 2025

TENTANG

PEMBETUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2025
PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR

CAMAT GAMBUT

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) SKPD yang diartikan sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini dan demi lebih efektif dan terarahnya pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2025 perlu dibentuk tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Gambut Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GAMBUT TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2025 KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2025 dimaksud dalam Diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gambut
pada tanggal : 02 April 2025

CAMAT GAMBUT,

AHMAD FAUZAN, S.STP., M.Si
Pembina / IV.b
NIP. 19801125 200012 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Gambut
Kabupaten Banjar
Nomor : 19.a Tahun 2025
Tanggal : 02 April 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2025
KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KETUA	CAMAT
2.	SEKRETARIS	SEKRETARIS KECAMATAN
3.	ANGGOTA	Kasi Pemerintahan
		Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		Kasi Kesejahteraan Sosial
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset
		JF Perencana


CAMAT GAMBUT
AHMAD FAUZAN, S.STP, M.Si
Pembina / IV.b
NIP. 19801125 200012 1 003

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
		KECAMATAN GAMBUT						7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00						7.120.544.172,00			
7		UNSUR KEWILAYAHAN						7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00						7.120.544.172,00			
7.01		KECAMATAN						7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00						7.120.544.172,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja dan Intern (IKKI)				79 Nilai	79 Nilai	5.247.867.172,00	5.098.585.000,00	5.231.353.000,00	3.677.000,00					5.251.544.172,00			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan				100 %	100 Persen	13.245.000,00	13.245.000,00	13.245.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	16.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	6 Dokumen	5.380.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		6.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		4.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		6.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan				100 %	100 %	4.319.502.172,00	3.853.220.000,00	3.849.180.000,00	-470.322.172,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	4.529.082.172,00	KECAMATAN GAMBUT	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.236.582.172,00	3.770.300.000,00	3.770.300.000,00	-466.282.172,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		4.436.582.172,00	KECAMATAN GAMBUT	

			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	13.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			13.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan				100 %	100 %	52.226.000,00	394.226.000,00	394.090.000,00	341.864.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		51.850.000,00	KECAMATAN GAMBUT
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	5.864.000,00	-136.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	17 Unit	46.226.000,00	388.226.000,00	388.226.000,00	342.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			45.850.000,00	KECAMATAN GAMBUT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	214.457.000,00	214.457.000,00	254.457.000,00	40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		217.162.000,00	KECAMATAN GAMBUT
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	56.262.000,00	56.262.000,00	96.262.000,00	40.000.000,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			56.262.000,00	KECAMATAN GAMBUT
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	153.195.000,00	153.195.000,00	153.195.000,00	0,00	Kab. Banjarnegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			155.400.000,00	KECAMATAN GAMBUT

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara			100 %	100 %	376.940.000,00	376.940.000,00	474.660.000,00	97.720.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		144.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya			7 Unit	9 Unit	68.440.000,00	68.440.000,00	116.160.000,00	47.720.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	20 Unit	13.240.000,00	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			16.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	3 Unit	295.260.000,00	295.260.000,00	345.260.000,00	50.000.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			53.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan			100 %	100 %	171.026.000,00	171.026.000,00	161.026.000,00	-21.026.000,00							150.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Data atau Informasi Pelayanan yang update Persentase Jenis Media Pengaduan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100 %	100 %	171.026.000,00	171.026.000,00	161.026.000,00	-10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		150.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			6 Laporan	6 Laporan	171.026.000,00	171.026.000,00	161.026.000,00	-10.000.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana			100 %	100 %	1.676.398.340,00	1.694.398.340,00	1.741.096.340,00	-115.398.340,00							1.561.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100 %	100 %	20.886.000,00	20.886.000,00	32.886.000,00	12.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		26.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	11.352.000,00	11.352.000,00	11.352.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		14.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	9.534.000,00	9.534.000,00	21.534.000,00	12.000.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		12.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100 %	100 %	64.746.000,00	64.746.000,00	64.746.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	70.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	50 Keluarga	64.746.000,00	64.746.000,00	64.746.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		70.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	29.880.000,00	29.880.000,00	29.880.000,00	3.120.000,00						33.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	26.820.000,00	26.820.000,00	26.820.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	29.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	23.760.000,00	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		25.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		4.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100 %	100 %	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	4.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT

7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	8.074.000,00	8.074.000,00	0,00	-8.074.000,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			7.250.000,00	KECAMATAN GAMBUT		
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.037.000,00	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT		
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.037.000,00	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	KECAMATAN GAMBUT		
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			4.750.000,00	KECAMATAN GAMBUT		
	KELURAHAN GAMBUT							7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00							7.120.544.172,00			
7	UNSUR KEWILAYAHAN							7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00							7.120.544.172,00			
7.01	KECAMATAN							7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00							7.120.544.172,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana			100 %	100 %	1.676.398.340,00	1.694.398.340,00	1.741.096.340,00	-115.398.340,00							1.561.000.000,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			100 %	100 %	1.590.766.340,00	1.608.766.340,00	1.643.464.340,00	52.698.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan			1.465.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.152.000,00	10.152.000,00	10.152.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Gambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					2 Unit	2 Unit	199.999.920,00	199.999.920,00	200.000.000,00	80,00	Kab. Banjar, Gambut, Gambut	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT

			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keturaahan				1 Laporan	1 Laporan	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	Kab. Banjar, Gambut, Gambut Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, bukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	KECAMATAN GAMBUT	
J U M L A H									7.245.220.512,00	7.113.938.340,00	7.283.080.340,00	37.859.828,00								7.120.544.172,00	